

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Jaminan Kesehatan Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan pada LKM dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat yang ditandai dengan tingkat animo partisipasi masyarakat Kota Bekasi yang mendaftarkan menjadi peserta program yang semakin tahun semakin banyak pesertanya dapat dikatakan berhasil dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, hal tersebut dijabarkan dengan berikut:

Implementasi program jaminan kesehatan berbasis NIK pada LKM sudah sesuai dengan teori pada tahapan — tahapan seperti didalam tahapan persiapannya para perencana mematangkan persiapan dengan mengkaji anggaran serta pedoman pelaksanaan yang berbentuk dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan juga keputusan kepala dinas kesehatan sehingga dalam pelaksanaannya pun dapat berjalan dengan aturan yang sudah ditentukan dan juga sesuai dengan standart aturan pelayanan yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pengguna atau penerima manfaat program jaminan kesehatan berbasis NIK pada LKM yang merasa puas dan nyaman dengan pelayanannya khususnya pelayanan di tingkat rujukan pertama dan kedua, namun selama pelaksanaan juga masih ditemukan hal yang belum sesuai dengan harapan, diantaranya adanya peraturan yang belum sepenuhnya diterapkan seperti

larangan masyarakat yang termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) seharusnya tidak dapat menggunakan program Kartu Sehat Bekasi pada LKM tetapi masih ditemukan masyarakat yang menggunakan program Kartu Sehat Bekasi pada LKM walaupun sudah masuk dalam kategori PBI.

Didalam penerapannya faktor pendukung sangat terlihat dari para pemilik kepentingan dalam hal ini lembaga — lembaga yang mendukung program jaminan kesehatan berbasis NIK pada LKM sangat terlihat sikapnya yang sudah sesuai dengan prosedur dan juga tugasnya seperti kepatuhan dalam masing — masing prosedur tugas dan aturan yang berlaku, namun faktor penghambat berasal dari masyarakat yang belum mau berpartisipasi dalam pengurusan administrasi seperti dalam pengurusan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) untuk bayi yang baru lahir agar bayi tersebut mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan berbasis NIK pada LKM yang ditanggung oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Memberikan hak kesehatan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat dibidang pengaksesan pelayanan kesehatan secara mendasar yang berasal dari Puskesmas dan pelayanan kesehatan lanjutan yang berasal dari Rumah Sakit yang ditandai dengan adanya hasil rekapan laporan yang menandakan setiap tahunnya pasien program jaminan kesehatan berbasis NIK pada LKM meningkat sehingga masyarakat dapat mengakses hak kesehatan tidak hanya sendiri tetapi juga dengan keluarganya.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Sehubungan dengan pemaparan hasil penelitian serta pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka rekomendasi akademik yang mampu peneliti berikan adalah :

1. Peneliti selanjutnya mampu menyelidiki lebih dalam menggunakan metode kualitatif terhadap implementasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah dalam layanan kesehatan masyarakat kota bekasi.
2. Peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait implementasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah dalam layanan kesehatan masyarakat kota bekasi dapat menambahkan atau mengubah teori dan metode lainnya.
3. Teori dan metode dalam penelitian ini mampu dipergunakan kembali guna pengujian selanjutnya pada kasus yang berbeda.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik benang merah yang berhubungan dengan kelemahan dan kelebihan dari program jaminan kesehatan berbasis NIK pada LKM atau Layanan Kesehatan Masyarakat Bekasi. Sehingga peneliti dapat mengemukakan beberapa saran mengenai Implementasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehaan Daerah dalam Layana Kesehatan Masyarakat di Kota Bekasi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Komitmen Pemerintah Kota Bekasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program, jadi diharapkan Pemerintah Kota Bekasi lebih menegaskan Peraturan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program. Seperti ketegasan kepesertaan dan penggunaan Kartu Sehat Bekasi pada LKM dengan program Jaminan Kesehatan yang dipunyai masyarakat agar masyarakat tidak menggunakan program jaminan kesehatan secara double dan mempunyai kriterianya dalam penggunaan.
2. Pembaruan persyaratan dalam pengrekitmen kepesertaan yang sesuai dengan kriteria kepesertaan dalam Peraturan Daerah dimana peserta yang sudah menjadi anggota Penerima Bantuan Iuran tidak dapat menjadi peserta program jaminan kesehatan berbasis NIK pada LKM sehingga tidak sia sia masyarakat.
3. Perluasan kerjasama dengan Rumah Sakit diluar kota bekasi ditambah lagi untuk menghindari masyarakat yang sedang diluar Kota Bekasi dan memiliki masalah kegawatdaruratan masih bisa ditangani dengan program jaminan kesehatan berbasis NIK pada LKM.
4. Penambahan program pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat mandiri dalam hal kesehatan agar masyarakat tidak terus bergantung kepada jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah melainkan jaminan kesehatan yang mereka tanggung sendiri karena adanya kesadaran dan kemandirian dalam memperoleh jaminan kesehatan secara mandiri.